

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adrian Sutedi. 2011. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Bambang Sunggono. 2012. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- C.S.T. Kansil, S.H. 1992. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jilid I Pengantar Ilmu Hukum*, Balai Pustaka, Cetakan kesembilan.
- Gatot Supramono. 2012. *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Indroharto. 1993. *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I: Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara. Edisi Revisi*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Irfan Fachrudin. 2004. *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*. Jakarta.
- Kamal Hidjaz. 2010. *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Makassar : Pustaka Refleksi.
- Lawrence M. Friedman. 1975. *The Legal System*. New York: Russel Sage Foundation.
- M. Nur Rasaid. 2003. *Hukum Acara Perdata, cet. III*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Miriam Budiardjo. 1998. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Moh. Taufik Makarao. 2004. *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata, cet. I*. Jakarta: Rineka Cipta
- Muchsan. 2007. *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati. 2009. *Argumentasi Hukum, Cetakan ke empat*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati. 2001. *Tata Perizinan Pada Era Otonomi Daerah*. Surabaya: Makalah.

- Prajudi Atmosudirjo. 1986. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- R. Soepomo. 1993. *Hukum Acara Pengadilan Negeri*. Jakarta: Pradanya Paramita.
- Ridwan H.R. 2003. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Rozali Abdullah. 2004. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Salim H.S. 2012. *Hukum Pertambangan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sarwono. 2011. *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soejono Soekanto. 2012. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Pers.
- Sudikno Mertokusumo. 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia.Edisi Ketujuh*. Yogyakarta: Liberty.
- Zainudin Ali. 2013. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan atau Pejabat Pemerintahan

Peraturan Menteri Nomor Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perizinan Dibidang Pertambangan Mineral dan Batubara.

C. Jurnal

Dedis Elvalina. 2016. “Kewenangan Pemerintah Provinsi Dalam Menerbitkan Izin Pertambangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah”, *JOM Fakultas Hukum*, Volume III No. 2, Pekanbaru.

Helmi. 2011. “Kedudukan Izin Lingkungan Dalam Sistem Perizinan di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 2 No. 2.

Ivan Fauzani Raharja. 2014. “Penegakkan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggar Perizinan”. *Inovatif*. Volume VIII No. II

Prima Nugraha,dkk. 2017. “Penerapan Status Clear and Clean oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Terhadap Izin Usaha Pertambangan”, *Diponegoro Law Journal*. Vol.6 No.2

D. Internet

<http://www.hukumpertambangan.com/izin-usaha-eksplorasi/persyaratan-untuk-memperoleh-izin-usaha-pertambangan-iup-eksplorasi/> diakses pada tanggal 9 Mei 2018 pada pukul 19.56 WIB

<http://amserveiup.blogspot.com/> diakses pada tanggal 20 Mei 2019 pada pukul 19.30 WIB

<http://albatrozz.wordpress.com/2008/08/21/efektivitas-eksekusi-pada-pasal-116-uu-no-5-tahun-1986-yang-telah-diubah-menjadi-uu-no-9-tahun-2004-tentang-ptun/>, diakses pada 14 Januari 2020 pada pukul 19:47 WIB

<https://www.mongabay.co.id/2017/11/11/pemerintah-sumbar-cabut-21-izin-tambang-bermasalah/> diakses pada tanggal 15 Januari 2020 pada pukul 13:04 WIB

